



SIARAN PERS

Nomor : 003/HM.00.02/SP/08/2024
Tanggal : 5 Agustus 2024

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI

a. Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Kerawanan Pemilihan adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilihan yang demokratis

Tujuan Pemetaan Kerawanan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

1. Melakukan Mitigasi Potensi Kerawanan Pemilihan 2024;
2. Melakukan Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi Isu Dan Tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024;
3. Menjadikan Hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 sebagai Basis Strategi Pencegahan.

Proses Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

1. Penyusunan Desain Konsep Kerawanan Pemilihan Tahun 2024
2. Penyusunan Instrumen Kerawanan Pemilihan
3. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024
4. Pemetaan Kerawanan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Outputnya adalah Pemetaan Wilayah Rawan serta Pemetaan Isu dan Tahapan Rawan
6. Langkah Mitigasi dan Pencegahan

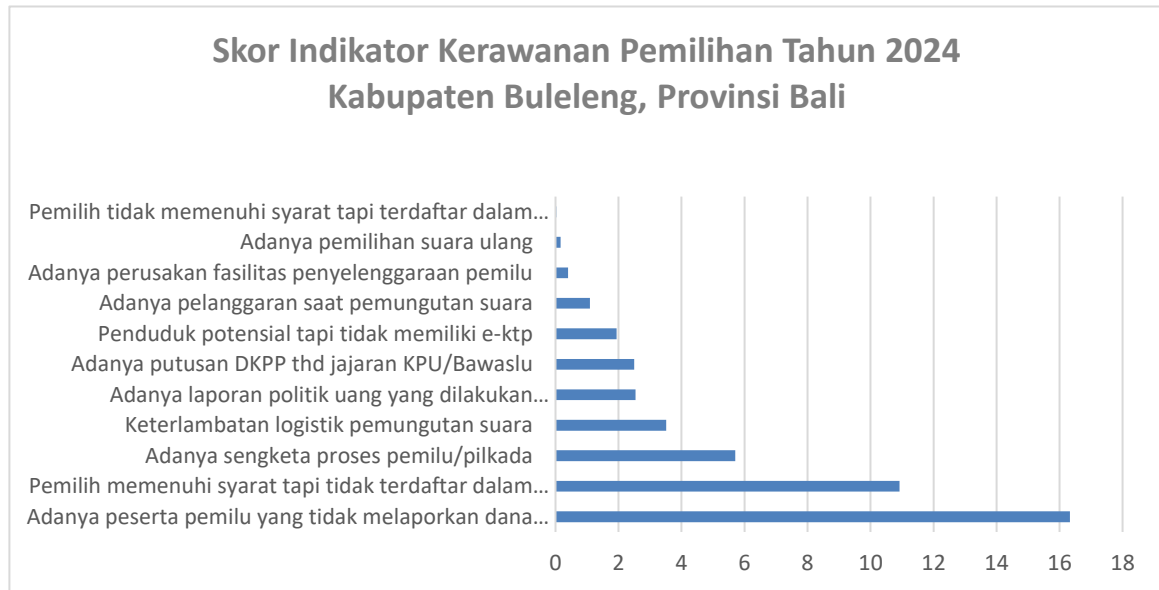
Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam upaya melaksanakan pencegahan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 11 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adapun peta kerawanan tersebut adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 01. Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Adanya peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye	16.32999992	Pelaporan Dana Kampanye	Dana Kampanye
2	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	10.92000008	Keakuratan Data Pemilih	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
3	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	5.710000038	Keberatan Pasangan Calon/Partai Politik	Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
4	Keterlambatan logistik pemungutan suara	3.50999999	Ketidaktepatan Waktu Pendistribusian Logistik	Pemungutan dan Penghitungan Suara
5	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	2.539999962	Politik Uang	Kampanye
6	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	2.5	Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu	Pencalonan dan Logistik
7	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP	1.940000057	Hak Untuk Memilih	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
8	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	1.090000033	Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan	Pemungutan dan Penghitungan Suara
9	Adanya perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu	0.400000006	Keamanan Penyelenggaraan Pemilu	Kampanye
10	Adanya pemilihan suara ulang	0.159999996	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan dan Penghitungan Suara
11	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	0.029999999	Keakuratan Data Pemilih	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Grafik 01. Skor Indikator Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali



Selain pemetaan kerawanan Pemilihan berdasarkan IKP Tahun 2024, pemetaan kerawanan juga dilakukan berdasarkan kejadian pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta kejadian saat proses pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berlangsung. Dari pemetaan tersebut, terdapat kejadian diantaranya:

Tabel. Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara	1	Ketidaksesuaian perolehan suara di setiap tingkatan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
2	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI	1	Netralitas ASN	Kampanye
3	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada	1	Keberatan Pasangan Calon	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
4.	Perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan	3	Kelengkapan Logistik di TPS	Pemungutan dan Penghitungan Suara
5.	Adanya peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye	1	Pelaporan Dana Kampanye Tidak Sesuai Ketentuan	Dana Kampanye
6.	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	25	Keakuratan Data Pemilih	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
7.	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	4	Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan	Pemungutan dan Penghitungan Suara
8.	Adanya pemilihan suara ulang	4	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan dan Penghitungan Suara
9.	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	1176	Keakuratan Data Pemilih	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
10.	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	1	Keberatan Peserta Pemilu	Kampanye

b. Analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan skor Indikator kerawanan tersebut diatas, dapat dianalisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Isu-isu yang menjadi kerawanan diantaranya:

- 1) Pelaporan Dana Kampanye tidak sesuai ketentuan
- 2) Keakuratan Data Pemilih
- 3) Keberatan Pasangan Calon/Partai Politik
- 4) Ketidaktepatan Waktu Pendistribusian Logistik
- 5) Politik Uang
- 6) Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu
- 7) Hak Untuk Memilih
- 8) Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan
- 9) Keamanan Penyelenggaraan Pemilu

- 10) Pemungutan Suara Ulang
- 11) Ketidaksesuaian perolehan suara di setiap tingkatan
- 12) Netralitas ASN

Dari hasil Analisa tersebut dapat disampaikan tahapan yang berpotensi rawan pelanggaran dalam pemilihan tahun 2024 diantaranya

1. Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
2. Tahapan pencalonan
3. Tahapan kampanye
4. Tahapan dana kampanye
5. Tahapan logistik
6. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara
7. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,
8. Tahapan perselisihan hasil Pemilu.

Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan sebagaimana diatas didasarkan atas kejadian pada Pemilu/Pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Kejadian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Isu Pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan
Pelaporan Dana Kampanye tidak sesuai ketentuan menjadi isu yang rawan terjadi pada Pemilihan tahun 2024 dikarenakan hal ini pernah terjadi pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024.
2. Isu Keakuratan Data Pemilih
Keakuratan Data Pemilih menjadi sering dijadikan indikator untuk tingkat Partisipasi Pemilih, tentu ini menjadi hal yang rawan dalam Pemilihan Tahun 2024 dikarenakan pernah terjadi pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024, dimana terdapat kejadian pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebaliknya.
3. Isu Keberatan dari calon terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan
Keberatan dari calon terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan menjadi isu yang rawan dikarenakan hal ini terjadi di Kabupaten Buleleng, dikarenakan adanya sengketa proses dala Pemilihan Tahun 2017, Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024.
4. Isu Ketidaktepatan Waktu Pendistribusian Logistik
Pendistribusian logistik yang tidak tepat waktu dianggap rawan karena mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Hal tersebut terjadi pada Pemilu 2019 dimana terdapat logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara didistribusikan pada Hari Pemungutan Suara di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng.

5. Isu Politik Uang

Politik uang selalu menjadi isu yang rawan pada setiap pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Dalam Pemilihan tahun 2024 hal ini menjadi rawan karena pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 adanya laporan Politik Uang.

6. Isu Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu menjadi rawan karena hal ini terjadi di Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Tahun 2017 dan Pemilu Tahun 2019.

7. Isu Hak Untuk Memilih

Hak untuk memilih menjadi isu yang rawan dikarenakan pada Pemilu masih terdapat pemilih yang belum perekaman KTP-el atau biasa disebut sebagai penduduk potensial pemilih belum perekaman KTP-el, hal ini terjadi pada Pemilu Tahun 2019.

8. Isu Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan

Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan hal ini terjadi Pada Pemilu 2017 dan Pemilu Tahun 2024.

9. Isu Keamanan Penyelenggaraan Pemilu

Keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi isu yang rawan dikarenakan hal ini terjadi pada Pemilihan Tahun 2017 dimana terdapat dugaan perusakan/perobekan Alat Peraga Kampanye.

10. Isu Pemungutan Suara Ulang

Ketidaksesuaian prosedur pemungutan suara berdampak terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) hal tersebut terjadi pada Pilkada 2017 dan Pemilu Tahun 2024

11. Ketidaksesuaian perolehan suara di setiap tingkatan

Pada Pemilu Tahun 2024, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

12. Netralitas ASN

Pada pemilu Tahun 2024, adanya Keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, dimana ASN tersebut melakukan siaran langsung pada Akun Media Sosial (Facebook) miliknya.

1) Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan Pemilihan tahun 2024 adalah :

- 1) Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024;
- 2) Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024;

- 3) Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan.

Oleh karena itu, dengan adanya 12 (dua belas) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng, maka Bawaslu Kabupaten Buleleng melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 02. Potensi Kerawanan dan Langkah Antisipasi

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1.	Pelaporan Dana Kampanye tidak sesuai ketentuan	Melakukan himbauan kepada Peserta Pemilihan.
2.	Keakuratan Data Pemilih	Melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Buleleng beserta jajarannya dalam proses Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024.
3.	Keberatan Pasangan Calon/Partai Politik	Melakukan himbauan baik kepada Penyelenggara maupun Peserta Pemilihan
4.	Ketidaktepatan Waktu Pendistribusian Logistik	Melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Buleleng
5.	Politik Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan himbauan kepada peserta Pemilihan 2. Melakukan sosialisasi secara massif kepada Masyarakat 3. Melakukan publikasi baik melalui website maupun media sosial terkait dengan larangan dan sanksi Politik Uang.
6.	Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu	Melakukan himbauan kepada Penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Buleleng beserta jajarannya.
7.	Hak Untuk Memilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Kabupaten Buleleng b. Dinas Dukcapil Kabupaten Buleleng c. Polres Buleleng d. Kodim 1609/Buleleng e. Dinas Sosial f. Lapas Kelas IIb Singaraja g. Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buleleng.

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
		2. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat pada Pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 3. Melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
8.	Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan	Melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Buleleng agar dalam melakukan Bimbingan Teknis kepada KPPS dapat dipahami.
9.	Keamanan Penyelenggaraan Pemilu	Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan pemerintah serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat
10.	Pemungutan Suara Ulang	Melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Buleleng beserta jajarannya.
11.	Ketidaksesuaian perolehan suara di setiap tingkatan	Melakukan himbauan kepada KPU Kabupaten Buleleng beserta jajarannya.
12.	Netralitas ASN	Melakukan himbauan dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Netralitas ASN.

2) Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilakukan sebagaimana diatas yang datanya bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 12 (dua belas) isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, diantaranya:
 - 1) Pelaporan Dana Kampanye tidak sesuai ketentuan;
 - 2) Keakuratan Data Pemilih;
 - 3) Keberatan Pasangan Calon/Partai Politik;
 - 4) Ketidaktepatan Waktu Pendistribusian Logistik;
 - 5) Politik Uang;
 - 6) Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu;
 - 7) Hak Untuk Memilih;
 - 8) Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan;
 - 9) Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
 - 10) Pemungutan Suara Ulang;
 - 11) Ketidaksesuaian perolehan suara di setiap tingkatan;
 - 12) Netralitas ASN.
2. Dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah antisipasi yang dilakukan ke depan guna mencegah terjadi pelanggaran maupun sengketa proses pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, diantaranya:

- 1) Melakukan himbauan kepada semua pihak;
- 2) Melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait;
- 3) Melakukan sosialisasi secara massif;
- 4) Melakukan Patroli Pengawasan;
- 5) Mendirikan Posko Aduan di masing-masing Tahapan Pemilihan.